

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik disebabkan karena masih kurangnya profesionalisme petugas instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah suatu kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tentunya setiap sarana dibangun menggunakan dana anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah juga di berikan tugas untuk mengatur urusannya sendiri yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat mengontrol dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaporkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat untuk menilai kinerja instansi tersebut.

Semakin lama perkembangan semakin pesat, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan munculnya tuntutan publik terhadap program-program yang dikelola instansi pemerintah, sehingga pemerintah juga dapat mengurangi pemborosan dana serta dapat mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik bagi suatu organisasi disebut prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi. Tantangan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah tertuju pada pengukuran kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk

menilai manajemen instansi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Kinerja pemerintah bukan sekedar menunjukkan bagaimana uang publik telah dibelanjakan tetapi kemampuan menunjukkan bagaimana uang tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi dalam bukunya *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (2019: 15) menyatakan Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan ini dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi. Menurut Mahmudi (2019: 83) Pengukuran kinerja *Value For Money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja ini merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik bagi organisasi.

Kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan salah satu cara yaitu pendekatan *value for money*. *Value For Money* (VFM) merupakan konsep penting dalam organisasi. Karena *Value For Money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya (Mahmudi, 2019: 83).

Dinas Pera KP alias Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang perumahan, jalan lingkungan, penyehatan lingkungan dan sarana utilitas. Dari semua program atau kegiatan yang telah dilaksanakan diperlukan penilaian untuk mengetahui capaian kinerja yang

dihasilkan. Capaian kinerja tersebut dapat digunakan sebagai penetapan kebijakan dalam meningkatkan kualitas kinerja instansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Dinas PERA KP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) tahun 2019 yang diukur dengan menggunakan pendekatan Efisiensi dan Efektivitas ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas PERA KP (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) tahun 2019 yang diukur dengan menggunakan pendekatan Efisiensi dan Efektivitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Dinas PERA KP kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi maupun umpan balik terkait penilaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Palembang dalam melaksanakan program atau kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan tambahan dan bahan referensi serta sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Teori ini akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dibutuhkan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai gambaran umum dan pembahasan yang telah di peroleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diberikan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Palembang.